

ANALISIS FUNGSI PARTAI DI PEMERINTAHAN
(Studi Pelaksanaan Agregasi Kepentingan oleh Anggota Fraksi Demokrat
dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung
Atas Isu Ketersediaan Air Bersih)

(Skripsi)

Oleh

Fitri Nestia



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PARTAI DI PEMERINTAHAN (Studi Pelaksanaan Agregasi Kepentingan oleh Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung Atas Isu Ketersediaan Air Bersih)

Oleh

FITRI NESTIA

Masyarakat membutuhkan penghubung antara dirinya dengan pembuat kebijakan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Sebagai sarana penghubung, partai politik melalui anggotanya yang duduk di legislatif mewakili rakyatnya untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Partai politik melaksanakan fungsi agregasi kepentingan untuk menyerap apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat kemudian memperjuangkan tuntutan-tuntutan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fungsi partai di pemerintahan studi pada pelaksanaan agregasi kepentingan oleh anggota fraksi Demokrat dan fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung atas isu ketersediaan air bersih. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi agregasi telah dilakukan dengan dua tahapan. Pertama penyerapan aspirasi masyarakat, yakni dengan melakukan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan melakukan reses sebagai bentuk upaya untuk memaksimalkan kinerjanya. Kedua pelaksanaan fungsi agregasi kepentingan, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, menyeleksi dan merumuskan kepentingan yang telah disalurkan untuk menjadi bahan rumusan kebijakan. Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam melaksanakan fungsi agregasi kepentingan dengan cara membawa keluhan atau masalah yang didengar untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD menggunakan tipe pelaksanaan agregasi kepentingan *pragmatic bargaining*. Hasil agregasi oleh DPRD Fraksi Demokrat adalah program bantuan air bersih dari Walikota Bandar Lampung. Hasil agregasi kepentingan oleh DPRD Fraksi PDI Perjuangan adalah program bantuan dari PDAM Pusat berupa pemasangan satu *jetpump* dan penambahan tiga sumur bor.

Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat, Fungsi Partai Politik di Pemerintahan, Agregasi Kepentingan

ABSTRACT

ANALYSIS OF PARTY FUNCTION IN GOVERNMENT (A Study on the Implementation of Interest Aggregation by Members of the Democratic Faction and the PDI-P Faction at the Bandar Lampung City DPRD On the Issue of Clean Water Availability)

by

FITRI NESTIA

Communities need a liaison between themselves and policy makers to convey what they need. As a means of liaison, political parties through their members who sit in the legislature represent their people to fight for common interests. Political parties carry out the function of interest aggregation to absorb what are the problems and needs of the community and then fight for these demands. The purpose of this study was to identify and analyze the function of parties in government. A study on the implementation of interest aggregation by members of the Demokrat and PDI-P faction in the DPRD Bandar Lampung City on the issue of clean water availability. The method in this study is a qualitative research method, as well as data collection techniques with interviews. The results of the study indicate that the implementation of the aggregation function has been carried out in several stages. First, the absorption of community aspirations, namely by conducting a recess to accommodate the aspirations of the community. Members of the DPRD for the Demokrat Faction and DPRD for the PDI-P faction held a recess as a form of effort to maximize their performance. Second, the Implementation of the Interest Aggregation Function, namely identifying, collecting, selecting and formulating interests that have been channeled to become material for policy formulation. Members of the DPRD for the Demokrat Fraction and DPRD for the PDI-P in carrying out the function of interest aggregation by bringing complaints or problems heard to be discussed in DPRD meetings use the Pragmatic Bargaining type of implementation of interest aggregation. The result of the aggregation by members of the DPRD of the Demokrat Faction is the clean water assistance program from the Mayor of Bandar Lampung. Then, the results of the aggregation of interests by members of the PDI-P faction DPRD were assistance programs from the central PDAM, installation of jet pumps, increasing the number of drilled wells.

Keywords: Community Aspiration, Political Party, Interest Aggregation

**ANALISIS FUNGSI PARTAI DI PEMERINTAHAN
(Studi Pelaksanaan Agregasi Kepentingan oleh Anggota Fraksi Demokrat
dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung
Atas Isu Ketersediaan Air Bersih)**

Oleh

Fitri Nestia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PARTAI DI PEMERINTAHAN
(Studi Pelaksanaan Agregasi Kepentingan oleh
Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI
Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung
Atas Isu Ketersediaan Air Bersih)**

Nama Mahasiswa : **Fitri Nestia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516021048**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Tabah Maryamah, M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP. 19810601 201012 1 003

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

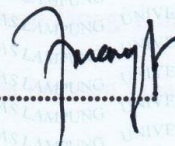
Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

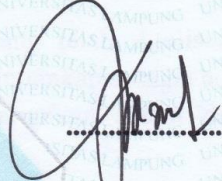
Ketua

: Dr. Tabah Maryanah, M.Si.



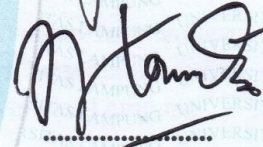
Sekretaris

: Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji

: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Fitri Nestia
NPM. 1516021048

Catatan :
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fitri Nestia dilahirkan di Negara Tulang Bawang pada 12 Februari 1996. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, putri dari Bapak Romzi dan Ibu Neli Yati.

Jenjang penulis dimulai tahun 2001-2002 di TK PG Bungamayang, Kab. Lampung Utara dilanjutkan di SD PG Bungamayang, Kab. Lampung Utara pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMP PG Bungamayang, Kab. Lampung Utara tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi, Kab. Lampung Utara tahun 2011-2014.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2015. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2018 di Desa Tebing, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur.

MOTTO

”Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada , pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua nya (pada hari kiamat). Sungguh, Allah Mahakuatas atas segala sesuatu.”

(Q.S Al-Baqarah : 148)

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu.”

(Q.S At-Taubah : 105)

“Di mana pun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan.”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

“Maka jangan biarkan siapapun dalam keadaan tak punya, selagi kamu dapat memberi”

(Fitri Nestia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad
Shalallahu'alaihiwassalam serta keluarga dan para sahabatnya.

Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat
dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

“Papahku Romzi dan Ibuku Neli Yati”

Terimakasih untuk setiap doa dan kasih sayang yang tiada habis kalian berikan, serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan untukku. Terimakasih atas kesabaran kalian dalam membimbingku. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas jerih dan payah yang telah dikerjakan.

“Teruntuk kakak-kakakku Kanjeng Dessy, Atuya, Uni Denti, Ses Ica, Tuan Yasir, dan Maharatu” terimakasih atas perhatian, bantuan, dan dukungan yang kalian berikan selama dalam perjalanan perkuliahanku.

“Untuk semua keponakanku Nabila, Nada, Fazilla, Khadafi, Moza” terimakasih atas semangat serta keceriaan yang selalu kalian berikan selama proses skripsi ini.

Terimakasih untuk seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila juga teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua..

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah Subhaanahuwata'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Fungsi Partai di Pemerintahan (Studi Pelaksanaan Agregasi Kepentingan oleh Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bandar Lampung Atas Isu Ketersediaan Air Bersih)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan dan kemudahan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi kasih sayang serta petunjuk bagi umat-Nya.
2. Kedua orang tua, Papah dan Ibu tercinta, Romzi dan Neli Yati atas setiap doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian dan kesabaran yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya. Semoga Allah Subhaanahuwata'ala selalu memberikan kesehatan, perlindungan kasih sayang dan Surga-Nya kelak, serta balasan atas segala jasa, usaha dan kebaikan Papah dan Ibu tercinta.

3. Kakak-kakak ku tersayang, Kanjeng Dessy atas bantuan dan dukungan penuh yang telah diberikan selama bimbingan skripsi. Juga Atuya, Uni Denti dan Ses Ica atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
4. Semua keponakanku, Nabila, Nada, Fazila, Khadafi, Moza yang telah memberikan semangat.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
8. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP. selaku pembimbing ke dua yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
9. Bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D. yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sangat baik.
10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
11. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah memberikan kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

12. Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Hendra Mukri, S.Sos dan Bapak Dedi Yuginta, S.E., M.Si. terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penelitian.
13. Kasubbag. Kepegawaian kecamatan Tanjung Karang Timur, Ibu Septian Isparina terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penelitian.
14. Kasubbag pelayanan/langganan bagian humas dan langganan PDAM Way Rilau, Bapak Matalkah terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penelitian.
15. Teman-teman tersayang Oktadila Anwari, Riesa Aprilia, Desi Wulandari yang telah menjadi saksi perjalanan serta tempat berbagi selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman perjuangan skripsi dimasa akhir studi Widya Putri Permatasari, S.IP, Prasetyo Buana, S.IP, Diska Aryanti, S.IP, Lisdaria, S.IP, Reza Rian Viccano, S.IP, Musa S Maskun, S. IP yang telah bersama-sama saling mendukung dalam penyelesaian skripsi.
17. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dikampus dan berproses bersama. Semoga kita dapat dipertemukan lagi dilain kesempatan.
18. Teman-teman KKN Desa Tebing yang telah bersama selama 40 hari serta memberikan perjalanan yang sangat berkesan.

Akhir kata semoga kebaikan kalian dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Fitri Nestia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Partai Politik	12
1. Pengertian Partai Politik	12
2. Fungsi Partai Politik	14
3. Tipe partai politik	22
B. Tinjauan Tentang Parlemen (DPRD).....	24
1. Definisi Parlemen (DPRD).....	24
2. Bentuk-bentuk Parlemen (DPRD).....	25
3. Fungsi Parlemen (DPRD).....	26
C. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	35

C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Penentuan Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Keabsahan Data	41

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran Fraksi/ Komisi DPRD	45

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat	50
2. Pelaksanaan Fungsi Agregasi Kepentingan	58
B. Pembahasan	66

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar nama anggota DPRD daerah pemilihan II Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2019	3
Tabel 2. Data penduduk menurut pekerjaan	43
Tabel 3. Data penduduk berdasarkan umur.....	44
Tabel 4. Data penduduk menurut pendidikan	44
Tabel 5. Data penduduk menurut agama.....	45
Tabel 6. Susunan keanggotaan komisi dan fraksi DPRD Kota Bandar Lampung.....	46
Tabel 7. Tahap Agregasi yang dilakukan Oleh Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tipe Bagian Partai Politik	15
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	33
Gambar 3. Struktur fraksi/ komisi DPRD Kota Bandar Lampung	46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan banyak dijumpai masalah-masalah yang timbul sebagai sebab maupun akibat dari aktivitas masyarakat yang memiliki banyak kepentingan dan kebutuhan. Beragam kebutuhan tersebut diantaranya bisa berupa kebutuhan pokok, rasa aman, pendidikan, tak terkecuali kebutuhan akan air bersih. Sejatinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat menuntut para penyelenggara negara untuk dapat memenuhinya karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang majemuk terdapat kepentingan dan kebutuhan yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dengan kondisi yang berbeda-beda itu maka diperlukan wadah untuk menjembatani penyampaian kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh partai politik melalui anggota-anggotanya. Anggota partai ini yang akan menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan.

Partai politik merupakan perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik juga menjadi alat pendengar bagi masyarakat terhadap aspirasi

masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah agar aspirasi masyarakat dapat terwujud menjadi sebuah kebijakan. Sesuai fungsinya partai politik harus mampu menjembatani permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat agar diteruskan ke pemerintah untuk mendapatkan solusi terbaik.

Partai politik memiliki tiga fungsi menurut VO Key antara lain fungsi partai di elektorat, fungsi partai sebagai organisasi, dan fungsi partai di pemerintahan. Dimana pada fungsi partai sebagai organisasi terdapat fungsi pengagregasian kepentingan yaitu partai politik memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya melalui anggota partai yang duduk di pemerintahan agar menjadi keputusan politik yang tepat.

Dalam konteks fungsi pengagregasian kepentingan partai politik menunjuk anggotanya yang layak untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Dengan kata lain anggota legislatif merupakan anggota partai yang berada di pemerintahan. Dimana fungsi anggota partai yang menjadi anggota DPR/DPRD adalah memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sebagai bangsa yang besar Indonesia mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda di tiap daerah sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

pasal 18 ayat 6. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai fungsi memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Berikut ini merupakan nama-nama anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, dan Kecamatan Enggal:

Tabel 1. Daftar Nama Anggota DPRD Daerah Pemilihan II Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2019

No.	Nama Anggota DPRD	Fraksi	Perolehan Suara
1	DafryAn Anggara	Gerindra	1.767 Suara
2	Dedi Yuginta, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	3.719 Suara
3	H. Yuhadi, S.Hi	Golkar	5.854 Suara
4	Tig Eri Prabowo	NasDem	3.121 Suara
5	Sofyan Sauri, S.Pd	PKS	4.054 Suara
6	Edison Hadjar, S.E.	PAN	2.952 Suara
7	Hi. Hendra Mukri, S.Sos	Demokrat	4.139 Suara
8	Pandu Kusuma Dewangsa, S.IP	PPP	4.931 Suara

Sumber : Website KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019

Dari nama-nama tersebut anggota DPRD Dedi Yuginta dari partai PDI Perjuangan dan Hendra Mukri dari partai Demokrat merupakan anggota DPRD yang telah terpilih selama dua periode, sehingga mereka sudah lebih memahami keadaan serta tuntutan/kepentingan warga Kecamatan Tanjung Karang Timur yang mereka wakili untuk kemudian diaggresikan sesuai harapan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsinya anggota dalam partai politik yang duduk di pemerintahan perlu melakukan reses. Reses dilakukan oleh anggota partai yang menjadi anggota DPR/DPRD. Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara

anggota partai dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Sehingga partai politik dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Anggota partai yang duduk di DPRD akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Namun kenyataannya pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat politik, *stake holders* atau pun LSM.

Saat musim kemarau tiba kebutuhan akan air bersih meningkat. Ini dipicu pasokan air yang berkurang sementara air merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Keterbatasan air bersih ini juga dirasakan warga Kecamatan Tanjung Karang Timur. Mereka mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih dilingkungannya, sehingga masyarakat merasa kurang mendapat perhatian dari Partai Politik yakni Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang anggotanya melakukan reses. Anggota kedua partai tersebut duduk di kursi DPRD sehingga sejatinya mereka memperjuangkan tuntutan ketersediaan air bersih karena DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Pelayanan penyediaan air bersih di perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di Kota Bandar Lampung dikeluhkan warga. Mulai dari masalah air yang keruh sampai air tidak mengalir. Warga Tanjung Karang Timur mengeluhkan air PDAM yang berwarna coklat dan keruh, sehingga warga tidak berani mengkonsumsi air tersebut.¹

¹ <https://www.kupastuntas.co/2018/02/20/musim-hujan-pelayanan-pdam-di-lampung-buruk/>

Banjir dan air bersih menjadi masalah yang paling sering disampaikan masyarakat kepada anggota partai politik saat melakukan reses (kegiatan luar masa sidang) di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing. Seperti Kecamatan Tanjung Karang Timur (TKT), saat acara reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat Hendra Mukri, Warga Kelurahan Kebon Sawoh Kecamatan Tanjung Karang Timur mengeluhkan tidak tersedianya air bersih di lingkungannya. Atas permasalahan ini warga Kelurahan Kebon Sawoh Kecamatan Tanjung Karang Timur meminta kepada Hendra Mukri selaku anggota DPRD agar menyarankan Pemerintah Kota untuk membangun sumur bor di lingkungannya. Begitu juga dengan warga Kelurahan Kebon Jeruk , Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang mengeluhkan minta dibuatkan pembangunan sumur bor.²

Selain anggota DPRD dari Partai Demokrat anggota DPRD dari partai lain yang juga melakukan reses di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan. Warga di kawasan tersebut, berdasarkan penelusuran sangat membutuhkan air bersih, sejak dilanda kemarau panjang. Selama ini warga terpaksa mencari air bersih ke luar kampungnya dengan cara membeli, atau mengambil air ke rumah saudaranya. Warga berharap kepada pemerintah kota dan provinsi, agar banyak membuat sumur bor di berbagai pemukiman penduduk. Hal tersebut untuk mengantisipasi musim kemarau

² <https://www.kupastuntas.co/2019/04/03/keluhan-banjir-dan-air-bersih-jadi-primadona-dalam-reses-anggota-dprd-bandar-lampung/>

panjang seperti sekarang. Sebab, ujar dia, warga tidak bisa hanya mengandalkan air hujan, air sungai, atau air PDAM.³

Kesulitan air bersih yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur terus terjadi dan menjadi semakin parah dirasakan oleh warga sekitar ketika musim kemarau datang. Salah satu warga yang bernama Tati mengatakan : “Ketika musim kemarau datang kami semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga kami terpaksa cari air bersih ke tempat jauh. Kalau mendesak kami langsung membeli air galon isi ulang”. Selama ini ia dan keluarga bergantung dengan kondisi air sumur untuk minum, masak, dan MCK. Sekarang terpaksa membeli air galon dikarenakan sumur yang mengering.

Sebagian warga yang kesulitan air bersih juga terpaksa mendapatkan air dari sumur bor warga yang lain nya namun lokasi harus keluar dari pemukiman dan itu cukup jauh. Beberapa warga yang melaporkan informasi atas sulitnya memperoleh air bersih ini dikarenakan sumur maupun sumber air yang ada kering dan pasokan air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) juga tidak mengalir.

Disinilah peran partai politik melalui anggotanya yang duduk di DPRD untuk menyerap tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk disampaikan ke partai politiknya guna diteruskan ke pemerintah. Ini sejalan dengan konteks partai politik sebagai organisasi, dimana titik urgen partai politik adalah kemampuan

³ <https://nasional.republika.co.id/berita/pvcqu1383/warga-di-bandar-lampung-mulai-sulit-mendapatkan-air-bersih>

dirinya sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara (Arya Budi, Polgov UGM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra Mukri selaku Anggota DPRD dari Partai Demokrat, bahwa aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur sudah disampaikan kepada partai namun saat ini memang belum ada tindak lanjut dari partai mengenai aspirasi tersebut.

Berikut ini merupakan pernyataan Hendra Mukri:

“Untuk semua aspirasi sudah kami sampaikan ke kantor kami buat laporan ke pimpinan dan partai, namun memang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya untuk aspirasi tersebut. Karena memang aspirasi yang masuk kan banyak bukan hanya dari Kecamatan Tanjung Karang Timur jadi tentunya membutuhkan proses juga dalam merealisasikan aspirasi tersebut. Namun saya selaku wakil rakyat sudah melakukan reses dan juga sudah menyampaikan yang menjadi kewajiban saya kepada pimpinan dan partai”. (Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2019).

Menurut anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan yang juga sudah melakukan reses terhadap masalah yang sama mengaku sudah menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai masalah air bersih yang berada di daerah pemilihannya yaitu Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berikut ini merupakan pernyataan

Dedi Yuginta :

“Masalah aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan kepada partai namun untuk realisasinya sendiri itu nanti menjadi urusan DPRD. Karena kan reses itu bagian dari tugas DPRD yang berasal dari partai, jadi anggota DPRD turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi. Dari aspirasi yang saya terima nanti kan saya sampaikan ketika musrenbang ke daerah pemilihan untuk turun ke daerah terkait yang memang memiliki permasalahan. Saat ini memang sudah ada realisasi namun mungkin memang baru daerah-daerah yang terakomodir saja belum seluruhnya. Namun nanti selanjutnya akan saya tinjau lagi ke daerah pemilihan untuk di adakan sumur bor”. (Wawancara dilakukan 22 Oktober 2019).

Menurut Dedi Yuginta, untuk menampung aspirasi masyarakat merupakan tugas lembaga legislatif yang melakukan reses maupun secara pribadi dengan berbagai konsekuensi sendiri. Anggota DPRD berkunjung untuk mendengar keluhan masyarakat, untuk laporan ke partai itu hanya secara global yang kami laporkan tetapi untuk usulan masyarakat bukan tempatnya partai yang merealisasikan. Partai melalui anggota DPRD nya hanya memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Anggota partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang duduk di DPRD telah melakukan reses terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur dan menemui masalah keterbatasan air bersih di kecamatan tersebut, maka dipandang perlu untuk menganalisa apakah upaya reses yang dilakukan telah dilaksanakan secara maksimal sesuai fungsi partai politik atau sebaliknya. Penelitian ini difokuskan pada upaya reses yang dilakukan dalam kurun waktu setahun sejak munculnya isu ketersediaan air bersih.

Penelitian terdahulu terkait dengan fungsi partai yang menjadi anggota legislatif adalah proses artikulasi kepentingan yang ditempuh PKS Kota Bandung (Solihin, 2018), dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua (Kundumuya, 2011), DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat (Sudarmansyah, 2013).

Penelitian Solihin (2018) menunjukkan proses artikulasi kepentingan yang ditempuh PKS Kota Bandung melalui tiga jalan yaitu, artikulasi kepentingan yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat atau disebut dengan ruang rakyat,

artikulasi yang dilakukan secara aktif oleh sistem politik dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga, kemudian proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik pemerintahan dan parlemen bersama-sama dengan masyarakat atau disebut dengan ruang musyawarah (*deliberative space*). Agregasi yang dilakukan oleh PKS Kota Bandung senantiasa berprinsip atas azas kebersamaan yang melalui lima tahapan yaitu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori artikulasi dan agregasi kepentingan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma kritis.

Penelitian Kundumuya (2011) menunjukkan dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dapat terlaksana dengan tidak baik. Hal ini disebabkan karena dominannya agregasi kepentingan politik elit pemerintah dan politik yang membuat desain politik perencanaan dan politik uang dalam pembahasan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah di lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

Penelitian Sudarmansyah (2013) menunjukkan ada beberapa yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Reses yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak tiga kali

reses. Reses ini dilakukan selain untuk melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan eksekutif, dan menyerap aspirasi masyarakat, juga untuk menjalin komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dengan metode penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kubu Raya terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman observasi dan daftar wawancara.

Berdasarkan uraian diatas, maka perbedaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu fokus penelitian hanya untuk kader dan kinerja anggota DPRD secara umum dalam mengimplementasikan fungsi agregasi kepentingan sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana fungsi agregasi kepentingan dilaksanakan oleh partai politik yang menjadi anggota DPRD. Teori pluralisme yang digunakan menjadi pembeda utama dengan penelitian penelitian sebelumnya yang memandang partai politik sebagai entitas politik yang homogen. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori tentang partai politik yang menggunakan instrumen tunggal. Namun teori ini telah ditinggalkan karena tidak cocok diterapkan di Indonesia yang wilayahnya luas dengan kepentingan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Maka penulis menggunakan teori pluralisme kepentingan yang dirasa lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan fungsi partai di pemerintahan oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan atas isu ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui pelaksanaan fungsi partai di pemerintahan oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan atas isu ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, Secara Akademis, dapat menganalisis partai dengan teori kepentingan pluralistik yang belum banyak digunakan. Selain itu juga dapat mengetahui bagaimana kualitas partai politik dengan melihat salah satu fungsinya yaitu pemerintahan.
2. Secara Praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan kepada partai politik tentang evaluasi kinerja anggota fraksi Demokrat dan fraksi PDI Perjuangan tentang fungsi agregasi kepentingan, serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme menyuarakan kepentingannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pada sebuah negara partai politik menjadi sebuah upaya penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan diserap dan disalurkan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan masyarakat mendapat perhatian untuk kemudian diperjuangkan pemenuhannya. Aspirasi masyarakat tersebut beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang bisa berbeda di tiap tempat. Aspirasi yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk usul kebijakan umum. Partai politiklah yang kemudian menjadi wadah untuk mewujudkan itu semua.

Partai politik merupakan susunan kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiarjo, 2008:403).

Partai politik adalah aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar

persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. (Sigmund Neumann) Partai politik merupakan kumpulan orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama, terorganisir, dan memiliki tujuan yang sama untuk meraih kekuasaan politik dalam pemerintahan negara. Partai politik berbeda dengan *movement* (gerakan). *Movement* merupakan kelompok orang yang memiliki aktivitas melakukan perubahan dengan cara-cara politik, dan bersifat ideologis terhadap lembaga politik. Sedangkan partai politik merupakan lembaga yang aktivitasnya bertujuan untuk meraih kekuasaan politik (Rahman, 2007:102).

Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah dan parlemen. Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi tidak langsung adalah karena ruang geografis yang semakin luas dan populasi penduduk yang semakin besar dalam wilayah suatu negara, sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin menyalurkan aspirasinya secara langsung (Sukriono, 2018:38).

Partai politik merupakan wahana bagi masyarakat dalam menyadarkan hak-hak politik tiap warga masyarakat hak berpendapat. Semua hak ini akan terpelihara melalui perjuangan partai politik. Masyarakat disadarkan betapa pentingnya ikut memikirkan kehidupan politik kenegaraan, berpartisipasi dalam proses pembentukan pemerintahan,

memilih orang-orang yang akan diangkat menjadi penguasa, ikut andil menentukan kebijakan publik, kesemua pendapat itu dapat disalurkan melalui kekuatan partai politik.

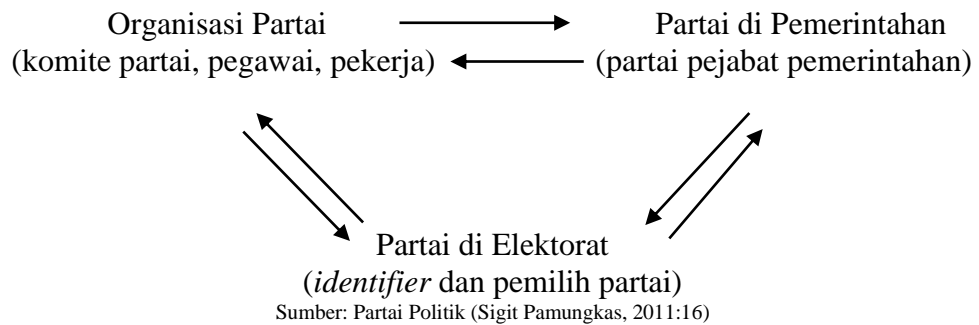
Menurut Garfield, partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan yang memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka (Suroto, 2003:19).

Partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun solidaritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-citanya.

2. Fungsi Partai Politik

Russell J. Dalton, dan Martin P. Wattenberg menggambarkan fungsi partai politik secara lebih lengkap dari setiap bagian (Sigit Pamungkas, 2011:15), yaitu:

Tipe Bagian Partai Politik



Gambar1. Tipe bagian partai politik

Pertama adalah fungsi partai di elektorat (*parties in the electorate*). Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi elektorat, yaitu:

- 1) Pertama, menyederhanakan pilihan bagi pemilih. Politik adalah fenomena yang kompleks, pemilih rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami semua persoalan dan mengkonfortasi berbagai isu-isu dalam pemilu. Partai politik membantu untuk membuat politik “*user friendly*” bagi warga negara. Sekali pemilih mengetahui partai mana yang biasanya mewakili kepentingan mereka, ini menjadi kunci informasi sebagai layar persepsi membantu bagaimana mereka melihat persoalan dan berperilaku ketika pemilihan.
- 2) Kedua, pendidikan warga negara. Partai politik adalah edukator, pada konteks itu partai politik adalah mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu. Partai politik bertugas memberikan informasi politik yang penting bagi warga negara. Selain itu partai politik juga mendidik warga negara mengapa

mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu. Pemilu menjadi salah satu kursus pendidikan warga negara yang bersifat masal.

- 3) Ketiga, membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas. Dalam sistem politik yang stabil, pemilih memerlukan jangkar politik, dan partai politik dapat memenuhi fungsi itu. Ketertarikan partisipan terhadap partai politik dapat melestarikan dan menstabilkan pemerintahan demokratis, menciptakan kesinambungan pilihan pemilih dan hasil pemilu.
- 4) Keempat, mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi. Hampir semua negara demokratis, partai politik memainkan peran penting dalam mendapatkan orang untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partai politik memobilisasi warga negara untuk terlibat dalam kampanye, serta berpartisipasi dalam aspek-aspek lain proses demokratisasi.

Kedua adalah fungsi partai sebagai organisasi (*parties as organization*).

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri.

Pada bagian ini partai politik memiliki empat fungsi:

- 1) Pertama, rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan. Fungsi ini sering disebut sebagai salah satu fungsi paling mendasar dari partai politik. Pada fungsi ini partai politik aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Desain rekrutmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjalankan fungsi ini. Kualifikasi siapa yang

akan diseleksi, siapa yang menyeleksi, di arena mana kandidat diseleksi, siapa yang menyeleksi dan siapa yang memutuskan nominasi, serta sejauh mana derajat demokratisasi dan desentralisasi adalah pertanyaan-pertanyaan kunci dalam desain seleksi kandidat.

- 2) Kedua, pelatihan elit politik. Dalam fungsi ini partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Berbagai materi pelatihan dapat meliputi pemahaman tentang proses demokrasi, dan prinsip-prinsip partai, serta berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh bangsa dan pilihan-pilihan fungsi utama partai di pemerintahan: kerja dari sistem demokrasi.
- 3) Ketiga, pengartikulasian kepentingan politik. Pada fungsi ini partai politik menyuarkan kepentingan-kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.
- 4) Keempat, pengagresian kepentingan politik. Fungsi ini membedakan partai dengan kelompok kepentingan, yaitu partai melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, sedangkan kelompok kepentingan terbatas pada artikulasi kepentingan.

Ketiga, adalah fungsi partai dipemerintahan (*parties in government*). Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat tujuh fungsi partai di pemerintahan:

- 1) Pertama, menciptakan mayoritas pemerintahan. Fungsi ini dilakukan setelah pemilihan. Partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen dituntut untuk menciptakan mayoritas politik agar dalam sistem parlementer dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem parlementer dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem presidensial, mengefektifkan pemerintahan.
- 2) Kedua, pengorganisasian pemerintahan. Pada fungsi ini, partai politik menyediakan mekanisme untuk pengorganisasian kepentingan dan menjamin kerjasama diantara individu-individu legislator.
- 3) Ketiga, implementasi tujuan kebijakan. Ketika dipemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerintahan. Normalnya, pelaksanaan fungsi ini dibentuk dari transformasi manifesto partai dan janji kampanye.
- 4) Keempat, mengorganisasikan ketidak sepakatan dan oposisi. Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjadi bagian dari penguasa (eksekutif). Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternatif kebijakan yang ditempuh penguasa.
- 5) Kelima, menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah. Adanya partai oposisi menyiratkan kepada siapa tanggung jawab sebuah pemerintahan harus dibebankan, yaitu partai penguasa. Partai penguasa bertanggung jawab terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah.
- 6) Keenam, kontrol terhadap administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan.

- 7) Ketujuh, memperkuat stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan secara langsung terkait dengan tingkat kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintahan, dan stabilitas pemerintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi. Dalam kerangka itu, fungsi partai untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan demokrasi adalah menjaga stabilitas partai.

Berdasarkan penjelasan fungsi partai politik diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik adalah untuk membantu masyarakat menyalurkan aspirasinya dan membantu masyarakat berpartisipasi dalam politik, mengawasi jalannya pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis.

Mengagregasikan kepentingan merupakan salah satu fungsi partai politik. Melalui anggotanya partai politik berupaya menyerap dan menampung kepentingan-kepentingan yang diwakilinya kemudian mengolah serta merumuskan kepentingan tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*).

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama, sekaligus juga menjadi

saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Surbakti, 2015)

Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengaggregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Haryanto (1984:123) tujuan partai politik meliputi:

- a. Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (*output* pada umumnya)
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada dipihaknya)
- c. Berperan sebagai pemadu (*Streamlining*), dalam hal ini partai politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Menurut Rahman (1998:75-76) fungsi agregasi kepentingan dalam pelaksanaannya memiliki tiga tipe yaitu, *Pragmatic Bargainning*, *Absolut Value Oriented* dan *Tradisionalistic*.

Penjelasan mengenai tipe agregasi kepentingan menurut Rahman (1998:75-76) adalah :

1. *Pragmatic Bargaining*

Tipe *pragmatic bargaining* agregasi ini akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yang datang dari masyarakat. Agregasi ini terjadi sebagai proses kompromi dengan melihat situasi dan kondisi serta keadaan waktu dan tempat.

2. *Absolut Value Oriented*

Tipe yang kedua ini merupakan kebalikan *pragmatic bargaining*, dimana dalam prosesnya menolak adanya kompromi. Penolakan itu dilakukan agar dapat menampung berbagai macam kepentingan/tuntutan yang ada dalam masyarakat. Tipe ini muncul sebagai rasionalisme yang kaku dengan mengagregasikan secara tepat dan seksama yang sesuai dengan cara-cara penyelesaian secara logis dan teoritis.

3. *Tradisionalistic*

Tipe agregasi kepentingan yang ketiga ini dimana proses agregasinya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijakan untuk masa yang akan datang. Untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang akan datang diambil kebijakan berdasarkan pola-pola yang telah ada dimasa yang lalu. Sumber daya dan energi sebagian besar anggota masyarakat dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional.

3. Tipe-tipe Partai Politik

Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak. Aneka klasifikasi tipe partai politik tersebut diakibatkan sejumlah sudut pandang. Misalnya, ada yang mengkaitkan dengan kesejarahan, hubungan sosial, berakhirnya perang ideologi, dan sebagainya.

Richard S. Katz membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu:

1) Partai Elit

Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan *client* (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk dikepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpadang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin fraksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk didalam parlemen.

2) Partai Massa

Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tasingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.

3) **Partai Catch-All**

Partai jenis ini dipermukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu disetiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai *Electoral-Professional* atau Partai *Rational-Efficient*.

4) **Partai Kartel**

Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka ditingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut pimpinan-pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

5) **Partai Integratif**

Partai jenis berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih, dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka

melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial.

B. Tinjauan Tentang Parlemen (DPRD)

1. Definisi Parlemen (DPRD)

Anggota DPRD merupakan jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memperjuangkan dan mewakili kepentingan rakyat. Adanya potret buruk terkait *track record* anggota DPRD kabupaten/kota yang selama ini merupakan wujud adanya kelemahan partai politik dalam melakukan peranannya, terutama dalam hal perekrutan kader. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rangka pengisian anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat, masing-masing partai lebih cenderung melirik calon yang notabennya memiliki modal *financial* meskipun bukan kader asli partai.

Menurut Sukarna (1990:61) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. DPRD adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control*, *legal control*, *social control*, *economic control*, *educational control*.

2. Bentuk-bentuk Parlemen (DPRD)

Menurut Cipto (1995:38-42) jenis-jenis perwakilan, model perwakilan dan tingkat responsi terhadap harapan masyarakat meliputi :

1) Jenis-Jenis Perwakilan

Pertama, jenis perwakilan geografis. Secara umum badan perwakilan mengandung arti bahwa setiap anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh bangsa. Sehingga wajar jika masyarakat luas mengharapkan agar parlemen mewakili kepentingan mereka. Namun kenyataannya setiap anggota parlemen hanya bersedia mewakili kelompok yang benar-benar diwakilinya di parlemen dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain.

Kedua, jenis perwakilan partai. Dalam sistem parlemen lainnya partai politik merupakan jenis perwakilan paling terkemuka. Khususnya dalam sistem-sistem politik dalam mana disiplin terhadap partai politik sangat tinggi. Dalam sistem semacam ini partai politiklah jenis perwakilan paling pokok. Partai politik mengendalikan proses rekrutmen anggota serta kegiatan legislatif di parlemen.

2) Model Perwakilan

Dalam perspektif hubungan antara anggota parlemen dan masyarakat yang diwakili sering timbul persoalan apakah seseorang tersebut sekedar sebagai seorang “utusan” ataukah sebagai seorang “wakil”. Jika sebagai seorang utusan maka seseorang anggota parlemen dengan sendirinya haruslah tunduk pada kehendak dari kelompok yang mengutusinya. Sebaliknya, jika seorang wakil, maka ia haruslah dapat

memutuskan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi kelompok yang diwakilinya.

3) Tingkat Responsi Anggota Parlemen

Setiap anggota parlemen manapun sudah tentu diharapkan oleh pemilihnya untuk memenuhi kehendak mereka, memberikan pelayanan serta memberikan berbagai bentuk kepuasan lain sekalipun hanya bersifat simbolik. Dalam usaha mereka menjalankan tugasnya sebagai wakil para pemilih tidak jarang terjadi perbedaan antara pendapat umum yang berkembang di luar gedung parlemen mengenai isu tersebut.

Untuk persoalan-persoalan mendasar dan sarat dengan kepentingan para pemilih biasanya antara pendapat umum dan pendapat para wakil yang terwujud dalam bentuk pemilihan terdapat keserasian. Namun persoalan-persoalan yang kurang dikenal oleh warga negara biasanya seperti urusan luar negeri maka tidak jarang antara pendapat umum dan pendapat para wakil berbeda.

3. Fungsi Parlemen (DPRD)

DPRD dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya memperjuangkan hak atau kepentingan masyarakat, namun DPRD juga memiliki hak-hak dalam menjalankan fungsinya. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan

administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Menurut Surbakti (1992:176) fungsi dari lembaga legislatif sendiri yaitu sebagai *policy making*, dimana para anggota DPRD dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Anggota DPRD juga memiliki kewajiban memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya kepada masyarakat di daerah pemilihannya, sebagai wujud dari tugas anggota DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Anggota DPRD harus menjadi aktor politik dalam melaksanakan fungsi partai politik, karena dalam perspektif demokrasi, partai politik sebagai organisasi yang sangat dibutuhkan untuk menjadi sarana partisipasi politik dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD harus rutin turun lapangan ke daerah pemilihan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya tidak ada kepentingan masyarakat yang tidak terealisasi.

DPRD dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya memperjuangkann hak atau kepentingan masyarakat, namun DPRD juga memiliki hak-hak dalam menjalankan fungsinya. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti

orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Fungsi pokok parlemen dengan demikian tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (*law-making-body*) semata-mata namun juga perlu dilihat sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dalam pemerintahan sistem parlementer ia juga berfungsi sebagai jalur rekrutmen kepemimpinan politik sekaligus sebagai badan pengelola konflik yang berkembang di masyarakat.

Menurut Cipto (1995:10-14) fungsi legislatif/parlemen meliputi :

1. Fungsi Komunikasi

Pada masa-masa awal pembentukannya parlemen berfungsi sebagai media penghubung antara istana dan rakyat. Pada masa-masa itu sektor transportasi dan komunikasi jelas masih dalam tahap paling awal. Dewasa ini fungsi tersebut masih tetap dijalankan oleh parlemen modern, parlemen menghubungi para pemilih, menyalurkan keluhan dan kehendak pemilih serta menyuarakan kepentingan mereka dalam sidang-sidang di parlemen maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan politik yang didengar pemerintah serta dicatat oleh media massa.

Fungsi komunikasi demikian masih tetap berjalan hingga kini. Seorang anggota badan legislatif sudah tentu tidak selamanya tinggal di pusat pemerintahan, Ia juga berkewajiban untuk menemui para pemilihnya di daerah sehingga perjalanan fisik yang dilakukan ke daerah para pemilihnya memperkuat fungsi komunikasi.

2. Fungsi Rekrutmen

Parlemen di sebagian negara merupakan media rekrutmen pemimpin nasional sementara di sebagian negara lainnya tidak. Tidak semua anggota kabinet suatu pemerintahan berasal dari anggota parlemen. Namun di negara-negara tertentu menjadikan karir di parlemen sebagai syarat mutlak untuk menduduki posisi lebih tinggi di badan eksekutif. Dalam kenyataannya parlemen memberi kesempatan besar bagi para anggotanya untuk mengembangkan syarat-syarat yang sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin.

3. Fungsi Pembuatan Undang-Undang

Fungsi pembuatan undang-Undang seringkali dimengerti sebagai satu-satunya fungsi parlemen. Padahal fungsi ini hanyalah salah satu dari ketiga fungsi pokok yang telah dikemukakan diatas. Pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Semakin banyaknya kelompok-kelompok diluar badan legislatif yang turut serta dan seringkali sangat kuat mempengaruhi proses pembuatan undang-undang.

Di Indonesia parlemen dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih populer dengan singkatan DPR. Istilah perwakilan disini seolah-olah menjadi fungsi utama parlemen di Indonesia, yakni mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah badan perwakilan.

Akhir-akhir ini orang lebih mengenal DPR sebagai badannya para anggota legislatif yang dipilih dari para calon legislatif. Perubahan sebutan ini seakan ingin menggambarkan para anggota DPRD tersebut benar-benar

anggota rakyat yang bekerja penuh sebagai perancang produk-produk legislatif.

Sebagian besar parlemen disebut sebagai lembaga atau badan perwakilan karena anggotanya dipilih secara langsung oleh para warga negaranya. Orang-orang yang dipilih oleh warga negara dengan demikian diharapkan untuk menjadi wakil mereka dalam badan perwakilan masyarakat tersebut. Itulah sebabnya parlemen lebih sering disebut sebagai badan perwakilan atau badan yang mewakili para pendukung anggota-anggotanya secara resmi dalam sistem pemerintahan.

Menurut Cipto (1995:38-42) jenis-jenis perwakilan, model perwakilan dan tingkat responsi terhadap harapan masyarakat meliputi :

1. Jenis-Jenis Perwakilan

Pertama, jenis perwakilan geografis. Secara umum badan perwakilan mengandung arti bahwa setiap anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh bangsa. Sehingga wajar jika masyarakat luas mengharapkan agar parlemen mewakili kepentingan mereka. Namun kenyataannya setiap anggota parlemen hanya bersedia mewakili kelompok yang benar-benar diwakilinya di parlemen dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain.

Kedua, jenis perwakilan partai. Dalam sistem parlemen lainnya partai politik merupakan jenis perwakilan paling terkemuka. Khususnya dalam sistem-sistem politik dimana disiplin terhadap partai politik sangat tinggi. Dalam sistem semacam ini partai politiklah jenis

perwakilan paling pokok. Partai politik mengendalikan proses rekrutmen anggota serta kegiatan legislatif di parlemen.

2. Model Perwakilan

Dalam perspektif hubungan antara anggota parlemen dan masyarakat yang diwakili sering timbul persoalan apakah seseorang tersebut sekedar sebagai seorang “utusan” ataukah sebagai seorang “wakil”. Jika sebagai seorang utusan maka seseorang anggota parlemen dengan sendirinya haruslah tunduk pada kehendak dari kelompok yang mengutusinya. Sebaliknya, jika seorang wakil, maka ia haruslah dapat memutuskan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi kelompok yang diwakilinya.

3. Tingkat Responsi Anggota Parlemen

Setiap anggota parlemen manapun sudah tentu diharapkan oleh pemilihnya untuk memenuhi kehendak mereka, memberikan pelayanan serta memberikan berbagai bentuk kepuasan lain sekalipun hanya bersifat simbolik. Dalam usaha mereka menjalankan tugasnya sebagai wakil para pemilih tidak jarang terjadi perbedaan antara pendapat umum yang berkembang diluar gedung parlemen mengenai isu tersebut.

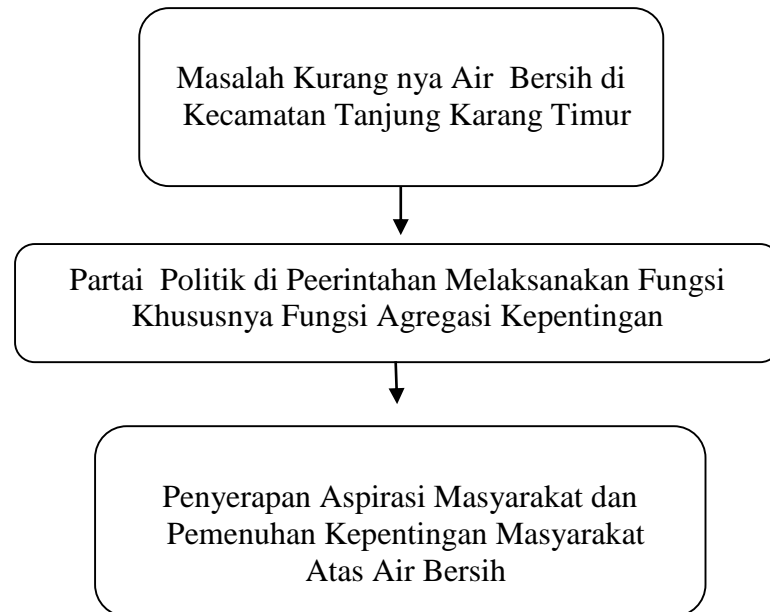
Untuk persoalan-persoalan mendasar dan sarat dengan kepentingan para pemilih biasanya antara pendapat umum dan pendapat para wakil yang terwujud dalam bentuk pemilihan terdapat keserasian. Namun persoalan-persoalan yang kurang dikenal oleh warga negara biasanya

seperti urusan luar negeri maka tidak jarang antara pendapat umum dan pendapat parawakil berbeda.

C. Kerangka Pikir

Masalah ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur menjadi masalah serius pada masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah ini merupakan isu faktual karena kerap kali muncul dan menjadi primadona pada saat dilakukan reses oleh anggota DPRD. Tentunya masyarakat menginginkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat membutuhkan penghubung antara dirinya dengan pembuat kebijakan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Partai politik hadir menjadi sarana penghubung tersebut. Melalui anggota partainya partai politik melakukan fungsi agregasi kepentingan untuk menyerap apa yang menjadi masalah dan kebutuhan mereka agar partai politik dapat memperjuangkan tuntutan itu sehingga mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Untuk itu harus dianalisa apakah agregasi kepentingan telah dilaksanakan atau sebaliknya. Mengingat pentingnya agregasi kepentingan oleh partai politik sesuai dengan salah satu fungsinya maka penulis menganalisa bagaimana partai Demokrat dan partai PDI Perjuangan mengagregasikan kepentingan masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur atas ketersediaan air bersih.

Uraian tersebut dapat dituangkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian analisis pelaksanaan fungsi agregasi kepentingan oleh anggota DPRD atas isu ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur karena fenomena yang diteliti oleh peneliti memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan secara mendalam. Karena metode penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus sehingga melalui metode penelitian ini peneliti diharapkan mampu menemukan atau mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana analisis pelaksanaan fungsi agregasi kepentingan oleh anggota DPRD atas isu ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur (Studi Pada DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung). Dalam penelitian ini membutuhkan informasi diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana hasil datanya bukan berupa angka atau statistik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah ketersediaan air bersih di Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Tanjung Karang Timur masih ditemui masalah keterbatasan air bersih yang cukup serius yang ditemukan di beberapa kelurahan saat dilakukan reses oleh anggota DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan. Beberapa warga mengeluhkan tidak tersedianya air bersih dilingkungannya dan beberapa warga juga mengatakan air sumur keruh ketika musim kemarau berharap dapat dibuatkan sumur bor oleh pemerintah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebelum digunakan dalam proses analisis, data dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenis dan karakteristik yang menyertainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Menurut Widi (2010:235) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yang diperlukan antara lain:

- a. Jumlah kunjungan anggota partai Demokrat dan partai PDI Perjuangan di Kecamatan Tanjung Karang Timur dan tindakan yang dilakukan.
- b. Hasil kunjungan anggota partai Demokrat dan partai PDI Perjuangan di Kecamatan Tanjung Karang Timur

Sumber data: warga, anggota Partai Demokrat dan PDI Perjuangan

2. Data Sekunder

- a. Jumlah warga yang menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM di Kecamatan Tanjung Karang Timur
- b. Kebutuhan air bersih warga Kecamatan Tanjung Karang Timur per hari
- c. Jumlah sumur bor atau PDAM dan volume air mengalir di Kecamatan Tanjung Karang Timur

Sumber data: warga, PDAM Tanjung Karang Timur

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Menurut Moleong (2000:97) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui analisis pelaksanaan fungsi agregasi

kepentingan oleh anggota DPRD atas isu ketersediaan air bersih di Kecamatan Tanjung Karang Timur

Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Ada pun informan dalam penelitian meliputi:

1. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II Fraksi PDI Perjuangan
2. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II Fraksi Demokrat
3. Camat/Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Karang Timur
4. Lurah di Kecamatan Tanjung Karang Timur
5. Masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Herdiansyah (2010:118) pada penelitian kualitatif wawancara terdiri atas tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang setiap pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan pedoman wawancara yang dipersiapkan. Kedua, wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang sudah ditentukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara namun bersifat

fleksibel atau dapat dikembangkan sesuai keadaan yang ada dilapangan. Ketiga, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas hanya berpedoman pada garis besar pertanyaan. Menurut Soehartono (2008:67) wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.

Penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana peneliti sudah menentukan pertanyaan melalui pedoman wawancara tetapi pertanyaan dikembangkan kembali oleh peneliti sesuai dengan keadaan dilapangan dan sesuai dengan jawaban Informan. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data ini karena dengan melakukan wawancara, penulis dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa data tentang jumlah kunjungan anggota Partai Demokrat dan PDI Perjuangan serta hasil yang didapat dan tindakan apa yang dilakukan, wawancara dilakukan dengan warga dan anggota Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Untuk data jumlah warga, kebutuhan air bersih per hari serta jumlah sarana air bersih dan volume air mengalir didapat melalui wawancara dengan warga, camat Tanjung Karang Timur dan PDAM Kecamatan Tanjung Karang Timur.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh

bahan-bahan yang terdiri dari: bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan primer maupun hasil penelitian, karya tulis, dan seterusnya. Bahan tertier, yaitu bahan yang terbentuk memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder.

Menurut Herdiansyah (2010:143) dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan.

Peneliti menggunakan dokumentasi dalam mengumpulkan data sebagai pendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yaitu data jumlah warga Tanjung Karang Timur, jumlah sumur bor yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian ini hanya bersifat menggambarkan dan menjelaskan keadaan dilapangan ke dalam bentuk tampilan kalimat yang sistematis serta dilengkapi keterangan-keterangan yang mendukung dalam memperoleh kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dapat dilakukan dalam beberapa tahapan:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan,

mengarah, membuang yang tidak perlu, mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lain yang masih termasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Transkrip yang telah direduksi dilakukan *display* berdasarkan fokus penelitian dalam bentuk tabel dan narasi. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Menurut Milles dan Huberman (1992:15-21) dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2007:324) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kreadibilitas (*creadibility*) melalui triangulasi. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Peneliti menggunakan triangulasi metode, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis

akan membandingkan hasil pengumpulan wawancara, observasi, dokumentasi, dari data yang didapatkan di lapangan. Triangulasi sumber dimaksud antara lain warga Kecamatan Tanjung Karang Timur, Anggota Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, PDAM Kecamatan Tanjung Karang Timur.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung Karang Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Dengan luas wilayah seluruhnya 239,25 Hektar. Wilayah kecamatan Tanjung Karang Timur berbatasan dengan kecamatan Way Halim disebelah utara, kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Enggal disebelah selatan, kecamatan Kedamaian disebelah timur serta disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal. Kecamatan Tanjung Karang Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 30,524 jiwa, yang terdiri dari 14,904 laki-laki dan 15,620 jiwa perempuan. Masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan buruh.

Tabel 2. Data penduduk menurut pekerjaan

No	Golongan Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah	Ket.
1	PNS	669	629	1,298	
2	TNI	107	3	110	
3	Polri	98	5	103	
4	Dagang	2,812	3,787	6,599	
5	Tukang	2,296	599	2,895	
6	Buruh	3,345	4,850	8,195	
7	Tani	-	-	-	
8	Pensiunan	1,023	1,039	2,602	
9	Lain-lain	701	1,981	2,682	
	Jumlah	11,051	12,893	23,944	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kecamatan Tanjung Karang Timur bermata pencaharian sebagai tukang, pedagang dan buruh.

Dari 11.051 orang terdapat 8.453 orang yang berprofesi sebagai tukang, pedagang dan buruh.

Table 3. Data penduduk berdasarkan umur

No.	Golongan Umur	Lk	Pr	Jumlah	Ket
1	0-4 Tahun	1,358	1,578	2,936	
2	5-6 Tahun	1,568	1,881	3,449	
3	7-13 Tahun	1,879	2,252	4,131	
4	14-16 Tahun	2,239	2,391	4,630	
5	17-24 Tahun	4,368	2,147	6,515	
6	25-54 Tahun	2,193	2,751	4,944	
7	55 Tahun keatas	1,599	2,32	3,919	
	Jumlah	15,204	15,320	30,524	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2018

Jumlah terbesar penduduk kecamatan Tanjung Karang Timur menurut umur adalah sejumlah 6.515 orang berumur 17-24 tahun. Untuk jumlah penduduk yang berusia 25-54 tahun juga besar yaitu sejumlah 4.944 orang.

Tabel 4. Data penduduk menurut pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah	Ket
1	Sarjana	923	1,137	2,060	
2	Sarjana muda	405	778	1,183	
3	SLTA	2,654	2,537	5,191	
4	SLTP	2,784	2,381	5,165	
5	SD	6,143	4,906	11,049	
6	TK	1,571	1,973	3,544	
7	Belum sekolah	1,201	1,131	2,332	
	Jumlah	15,681	14,843	30,524	

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Tanjung Karang Timur banyak yang masih berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 11.049 orang. Akan tetapi terdapat warga yang berpendidikan sarjana dengan jumlah yang cukup banyak sejumlah 2.060 orang.

Tabel 5. Data penduduk menurut agama

No.	Agama	LK	PR	Jumlah	Ket
1	Islam	15,292	14,229	29,521	
2	Kristen rotestan	391	171	562	
3	Kristen Khatolik	80	64	144	
4	Budha	120	137	257	
5	Hindu	22	18	40	
	Jumlah	15,905	14,619	30,524	

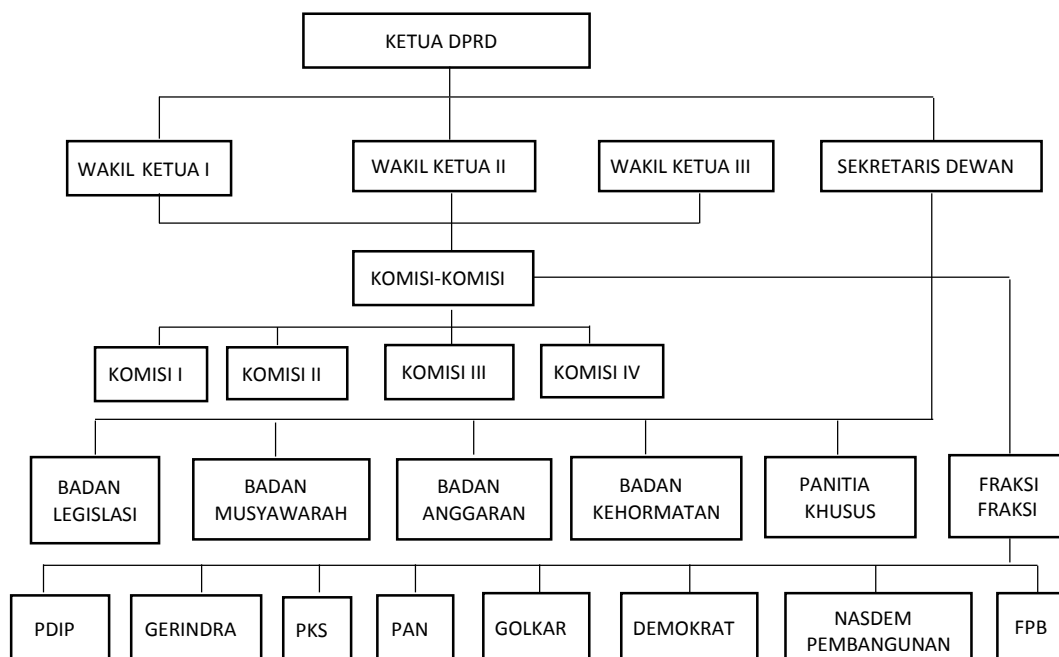
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2018

Agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat kecamatan Tanjung Karang Timur adalah Islam. Terdapat 29.521 orang yang beragama islam di daerah tersebut.

B. Gambaran Fraksi/ Komisi DPRD

1. Struktur organisasi

Setiap organisasi ataupun lembaga memiliki struktur organisasi agar pelaksanaan tugas terorganisir dengan baik sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing. Struktur DPRD Kota Bandar Lampung adalah seperti gambar berikut:



Gambar 3. Struktur fraksi/ komisi DPRD

Sementara untuk keanggotaan dalam komisi dan fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Susunan Keanggotaan Komisi dan Fraksi DPRD Kota Bandar Lampung

No.	Komisi	Fraksi	Nama Anggota DPRD	Bidang
1.	Komisi I	PDI. Perjuangan	H. Pulung (Ketua)	Pemerintahan, hukum dan perizinan
		Demokrat	Fandi Tjandra (Anggota)	
		Nasdem	Hendra M. (Wakil Ketua)	
			Pandu KD (Sekretaris)	
			Tig Eri P (Anggota)	
		Gerindra	Ilham Alawi (Anggota)	
		PKS	Sidik Efendi (Anggota)	
		PAN	Raka Irwanda (Anggota)	
		Golkar	Beni Mansyur (Anggota)	
		Perindo	Isfansa Mahani (Anggota)	
			Robiatul A(Anggota)	

2.	Komisi II	Demokrat	Agusman Arief (Ketua)	Perekonomian
		PAN	Agus Purwanto (Anggota)	
		Perindo	Erwansyah (Wakil Ketua)	
			Susanti (Sekretaris)	
		PDI. Perjuangan	Nisfu Apriana (Anggota)	
		Gerindra	Wiwik A (Anggota)	
			Rizaldi (Anggota)	
		PKS	Dafran A (Anggota)	
		Golkar	Agus Jumadi (Anggota)	
		Nasdem	Heti Friskatati (Anggota)	
			Misgustini (Anggota)	
3.	Komisi III	Golkar	H. Yuhadi (Ketua)	Keuangan
		PKS	Handri K (Wakil Ketua)	
		Gerindra	Akhmad Riza (Sekretaris)	
		PDI. Perjuangan	Dedi Yuginta (Anggota)	
			Endang Asnawi	
		Nasdem	(Anggota)	
			Afrizal (Anggota)	
	Demokrat	Naldi Rinara (Anggota)		
	Perindo	Febriani Piska (Anggota)		
		Taufik Rahman (Anggota)		
4.	Komisi IV	Gerindra	Darma Setiawan (Ketua)	Pembangunan
			Darmawansyah (Anggota)	
		PDI. Perjuangan	Sri Ningsih (Wakil Ketua)	
			Rakhmad N (Anggota)	
		Golkar	Ali Wardana (Sekretaris)	
		PKS	Sofyan Sauri (Anggota)	
			Yuni Karnelis (Anggota)	
	Perindo	Peny Asih (Anggota)		
		Rolland Nurfa (Anggota)		
	Demokrat	Mungliana (Anggota)		

Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, 2022

2. Tugas pokok dan fungsi

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

- 4) Mengusulkan:
 - a) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - b) Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - c) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - d) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas tersebut DPRD juga mempunyai fungsi. Fungsi DPRD antara lain adalah:

- 1) Fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

3. Keanggotaan

Dalam UU 27/2009 disebutkan bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD dibatasi, paling sedikit 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang untuk DPRD Propinsi. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang. Keanggotaan DPRD disahkan atau diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Propinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap anggota DPRD memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang dihimpun serta hasil pengamatan dan wawancara selama penelitian ini berlangsung maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan warga kecamatan Tanjung Karang Timur akan air bersih sangat tinggi karena sebagian besar warga menggantungkan pemenuhan kebutuhan tersebut pada PDAM.
2. Jumlah sarana PDAM yang tersedia tidak memadai karena tidak sebanding dengan jumlah warga serta jumlah kebutuhan air bersih termasuk sarana pipa saluran air yang tidak menjangkau rumah warga seluruhnya.
3. Warga kerap kali mengambil air dari sumur-sumur masjid bahkan sampai harus membeli air bersih yang mana hal ini tidak efektif dan efisien.
4. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat dan fraksi PDI Perjuangan sudah melakukan reses terkait keluhan warga kecamatan Tanjung Karang Timur atas keterbatasan air bersih.
5. Keluhan sudah diagregasikan tetapi belum menasar pada solusi yang tepat, dilihat dari belum meratanya penambahan sumur bor dan bantuan yang datang berupa bantuan tangki keliling dinilai hanya solusi sementara.
6. Anggota DPRD fraksi Demokrat dan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan melakukan agregasi kepentingan dengan tipe *pragmatic bargaining* dimana

dalam tipe ini agregasi akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yang datang dari masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan upaya penyerapan aspirasi masyarakat salah satunya dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Reses dilakukan minimal dua kali dalam setahun di daerah yang sangat kesulitan mendapatkan air bersih terutama di kelurahan Kota Baru, Kebon Jeruk dan Sawah Brebes.

7. Permasalahan air bersih di kecamatan Tanjung Karang Timur sudah mendapat respon dan sudah dilakukan penambahan fasilitas sumur bor PDAM, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan warga akan air bersih.
8. Anggota DPRD fraksi Demokrat dan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan sama-sama menggunakan tipe pelaksanaan agregasi kepentingan *pragmatic bargaining* dimana dalam tipe ini agregasi akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yang datang dari masyarakat. Tipe ini sesuai dengan pelaksanaan fungsi agregasi yang dilakukan oleh kedua anggota DPRD tersebut dimana keduanya melakukan reses guna menghimpun keluhan dan aspirasi terkait kurangnya ketersediaan air bersih dengan tetap memperhatikan segala aspek serta situasi dan kondisi maupun kepentingan pihak-pihak terkait pada saat mengagregasikan dan merumuskan kebijakan.
9. Hasil dari agregasi kepentingan yang dilakukan DPRD fraksi Demokrat adalah program bantuan air bersih dari Walikota Bandar Lampung, sedangkan fraksi PDI Perjuangan menghasilkan program bantuan dari

PDAM pusat dan penambahan jetpump di kelurahan Kebon Jeruk serta penambahan sumur bor di kelurahan Sawah Brebes.

B. Saran

Melihat kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Anggota DPRD fraksi Demokrat dan PDI Perjuangan harus lebih memperhatikan keluhan warga dengan cara melakukan reses terjadwal sehingga warga mengetahui kapan mereka akan berkunjung dan komunikasi tercipta dengan baik.
2. Pihak pemerintah lebih tanggap menerima keluhan yang diagregasikan oleh anggota DPRD sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.
3. Bantuan yang diberikan berupa tangki keliling tentunya bukanlah solusi akhir dari permasalahan ini, melainkan harus diupayakan menambah dan memperbaiki sarana PDAM yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta. Pustaka Indonesia
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Utama.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta. Ombak
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta Utara. PT Raja Grafindo Persada
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto.1984. *Partai Politik Suatu tinjauan umum*. Yogyakarta. Liberty
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Salemba Humatika.
- Idrus, M.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
- Kusumaatmadja, Mochtar.1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta. Bina Cipta
- Moleong, L. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Kosdakarya.
- Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Rizal, Afib. 2011. 'Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010'. Tesis. UUniversitas Diponegoro, Semarang.

- Sukarna.1990.*Perbandingan Sistem Politik*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sartori, Giovanni. 2005. *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, Colchester. European Consortium for Political Research Press
- Suroto, Rudianto. 2003. *Partai-Partai Politik di Indonesia*. Jakarta. PT Citra Mandala Pratama
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Soehartono, Irawan.2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Malang. Pustaka Pelajar
- Widi, Restu K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Jurnal :

- Adianto dan As'ari. 2016. Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016*
- Kundumuya, Antonius. 2011. Dampak Agregasi Kepentingan Politik Terhadap Kinerja Lembaga Legislatif Pasca Pemilu 2009 Di Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013
- Sukriono, Didi. 2018. Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *JIPPK, Volume 3, No 1*.
- Solihin, Olih. 2018. Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009. *Jurnal Agregasi Vol.6/No.1/2018*
- Sulistyowati. 2015. Kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 2, September 2015*

Sudarmansyah. Agus. 2013. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Konstitun di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PMIS-UNTAN-PSIP-2013*, Vol. 0001 Februari 2013

Annas, A., & Anirwan, A. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja DPRDKabupaten Soppeng. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(2), 82-99.

Sumber Lain :

<https://www.kupastuntas.co/2019/04/03/keluhan-banjir-dan-air-bersih-jadi-primadona-dalam-reses-anggota-dprd-bandar-lampung/>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, PDP dan DPRD. Penerbit PT. Fokus media. Jakarta

<http://www.lampost.co/berita-kemarau-bantuan-air-bersih-amat-dibutuhkan-warga.html>

<https://lampungpro.com/post/22003/masuk-kemarau-bpbd-bandar-lampung-siagakan-air-bersih-untuk-daerah-kekeringan>

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/979468/act-lampung-beri-bantuan-droping-air-bersih-ke-bakung>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Prwakilan_Rakyat_Daerah_Kota_Bandar_Lampung